

Bab II

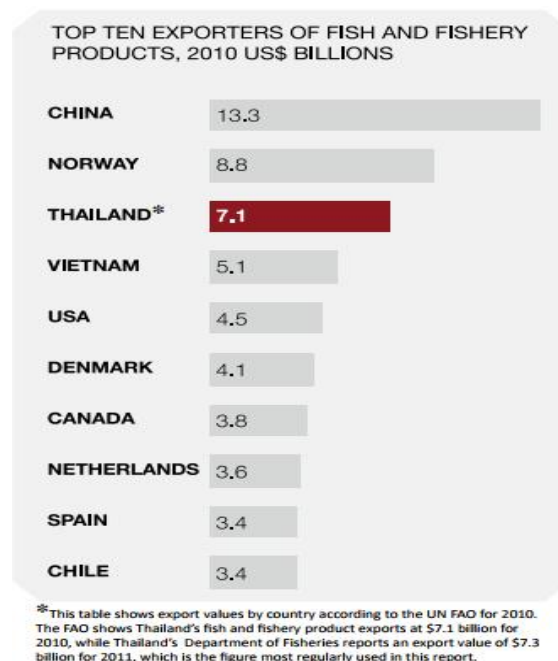
Kasus *Slavery and Human Trafficking* di Industri Perikanan Thailand

1.1 Profil Negara Thailand

Thailand merupakan pasar penting di Asia yang menjadikannya sebagai salah satu Negara pemain utama industri *seafood* dunia. Berdasarkan catatan *Food and Agriculture Organization* (FAO), produksi perikanan tangkap Thailand mencapai 1.843.747 ton pada tahun 2013. Sementara total ekspor perikanan pada tahun 2014 mencapai nilai US\$ 6,4 milyar. Hal ini menjadikan Thailand menduduki peringkat empat eksportir perikanan dunia dibawah China, Norwegia dan Vietnam (UN FAO, 2010).

Gambar 1.1

Sepuluh Eksporter produk ikan terbesar berdasarkan UN FAO 2010

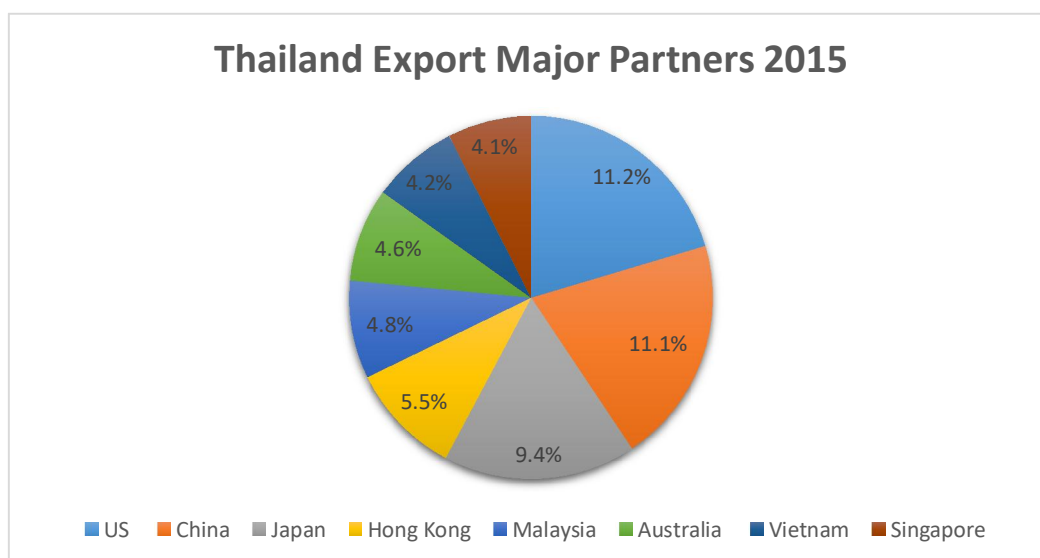


Keterangan: Tabel menunjukkan nilai ekspor oleh negara-negara berdasarkan UN FAO tahun 2010. FAO menunjukkan bahwa produk ekspor perikanan Thailand mencapai \$7.1 milyar pada tahun 2010, sementara Departemen Perikanan Negara Thailand mencatat nilai ekspor Thailand mencapai US \$7.3 milyar pada tahun 2011. Sumber: UN FAO, 2010

Berdasarkan tabel diatas, Thailand merupakan salah satu negara eksportir *seafood* terbesar di dunia dibawah China dan Norway; 90% produksi perikanan Thailand diekspor ke banyak negara berkembang dan negara maju. Produk ekspor utama berdasarkan nilainya adalah ikan tuna (US\$ 2,6 miliar) dan udang senilai US\$ 1,1 miliar. Nilai ekspor perikanan Thailand berdasarkan *United Nations Food and Agriculture Organization/* FAO diatas mencapai US\$ 7.1 milyar pada tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011 Departemen Perikanan Thailand mencatat total nilai ekspor Thailand mencapai US\$ 7.3 milyar.

Adapun tujuan ekspor Thailand meliputi Negara Jepang (20,4%), Australia (5,4%), Kanada (4,4%) Inggris (3,9%) dan tujuan ekspor teratas (22,8%) adalah negara adidaya Amerika Serikat (National Marine Fisheries Service, 2015). Sementara mitra ekspor utama Thailand menurut CIA World Factbook 2015, Amerika berada di urutan pertama sebesar 11.2%, China 11.1%, dan Jepang berada di urutan ketiga sebesar 9,4% disusul negara Hongkong, Malaysia, Australia, Vietnam dan Singapura sesuai dengan data berikut ini:

Grafik 1. 1 Negara-negara mitra utama Thailand di bidang ekspor 2015



Keterangan: grafik diatas merupakan data negara-negara mitra utama Thailand di bidang ekspor. Amerika Serikat merupakan mitra ekspor teratas Thailand sebesar 11.2% pada tahun 2015. Sumber: CIA World Factbook / Exports - major partners 2015

Dengan jumlah penduduk lebih dari 60 juta orang (CIA World Factbook 2017), pasar domestik Thailand mampu menyerap lebih dua juta ton produk perikanan per tahunnya. Terdapat sekitar 200 UPI (Unit Pengolahan Ikan) di Thailand dan sekitar 120 UPI mempunyai ijin untuk ekspor ke Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang (EJF, 2013: 20). UPI tersebut menghasilkan dan mengekspor berbagai ragam produk ikan, termasuk ikan beku, semi olahan dan produk bernilai tambah. UPI di Thailand tersebar di hampir semua provinsi yang ada di Thailand, termasuk provinsi Songkhla.

1. 2 Profil Provinsi Songkhla

1.2.1 Perindustrian Ikan Songkhla

Songkhla merupakan salah satu provinsi yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan ekonominya paling maju di kawasan Selatan Thailand. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Thailand Selatan, pemerintah pusat membentuk kebijakan *The Administrative Center for Southern Border Province* yang dipimpin oleh *Deputy Permanent Secretary of Interior Ministry for the Special Affairs*. Salah satu misi dari kebijakan tersebut adalah Pemerintah Thailand memberikan dukungan keuangan, mengatasi pemasaran, membangun pelabuhan dan membantu dalam memperbaiki dermaga, gudang-gudang pendingin serta pengerukan alur-alur perairan yang dilalui kapal-kapal (Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Kerajaan Thailand, 2015).

Dikarenakan *Gross Product* Songkhla mencapai 17.5% (KRI Songkhla, Thailand, 2015) dari seluruh provinsi kawasan Selatan serta peranannya yang penting dalam pembangunan, provinsi ini menjadi pusat industri dan investasi serta perdagangannya menonjol dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di kawasan Thailand Selatan. Disamping itu, perdagangan luar negeri juga semakin penting dalam meningkatkan pendapatan provinsi Songkhla. Oleh karena itu, pelabuhan internasional di Singhanakhon berperan penting dalam mendukung kegiatan perdagangan internasional Songkhla (Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Kerajaan Thailand, 2015). Berikut adalah data singkat perekonomian Thailand Selatan 2015:

Gambar 1.2

GDP Provinsi Thailand Selatan 2015

Province :	GDP per capita :	Population: (thousands)
1. Chumphon	151,835	485
2. Ranong	91,452	254
3. Surat Thani	183,584	1,041
4. Phang Nga	177,350	267
5. Krabi	217,685	372
6. Nakhon Si Thammarat	91,648	1,514
7. Trang	96,801	621
8. Phuket	306,779	535
9. Phatthalung	60,497	503
10. Satun	112,051	280
11. Songkhla	153,505	1,530
12. Pattani	73,338	625
13. Yala	89,875	444
14. Narathiwat	54,922	686

* GDP per capita in 2015 for Southern Region. Real GDP in Thai Baht at current market prices.

Source : Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) Note : data 2015 (last available mid 2017).

Keterangan: Data singkat perekonomian Thailand Selatan pada tahun 2015. Thailand Selatan memiliki 14 provinsi, termasuk Songkhla. GDP per capita Songkhla mencapai 153.505 Bath pada tahun 2015. 1 Bath = 450 rupiah.

Volume perdagangan luar negeri tahun 2008 via pelabuhan di Singhanakhon, Songkhla mencapai 1.815.921 ton dengan perincian sebagai berikut: total impor mencapai 442.692 ton dan total ekspor mencapai 1.373.229 ton (KRI Songkhla Thailand, 2015). Hal ini menjadikan Songkhla sebagai salah satu provinsi yang memiliki industri perikanan yang besar di Thailand. Industri perikanan di Thailand sangat penting bagi perekonomian Thailand. Berdasarkan laporan *Department of Fisheries Thailand* tahun 2012, Thailand mampu menghasilkan 4.2 juta ton hasil laut setiap tahunnya, 90% dari hasil tersebut ditargetkan untuk pasar ekspor (Department of Fisheries Thailand, 2012).

1.2.1 Hasil olahan ikan Songkhla

Selain bergerak dalam bidang penangkapan hasil laut, industri-industri perikanan di provinsi Songkhla Thailand juga mengolah limbah ikan yang disebut *fishmeal*. Ikan yang sudah tidak segar lagi (*trashfish*), tidak lantas dibuang melainkan diolah menjadi produk panganan hewan. Tabel dibawah ini menunjukkan daftar lima provinsi teratas penghasil *fishmeal* di Thailand. Adapun provinsi-provinsi yang termasuk didalamnya adalah Samutsakorn, Nakorn Sithammarat, Pattani, Ranong, Phuket, Trang dan provinsi Songkhla.

Tabel 1.1

Provinsi Penghasil Ikan Olahan terbesar di Thailand tahun 2011

Figure 17: Thailand's top five fishmeal producing provinces in 2011

Rank	TFPA	DoF
1	Samutsakorn , 138,420 tons or 27.51%	Samutsakorn , 115,668 tons or 35.3%
2	Nakorn Sithammarat , 66,490 tons or 13.21%	Songkhla , 39,402 tons or 12.03%
3	Songkhla , 56,960 tons or 11.32%	Ranong , 31,640 tons or 9.66%
4	Pattani , 42,459 tons or 8.41%	Phuket , 25,127 tons or 7.67%
5	Trang , 37,840 tons or 7.52%	Pattani , 24,243 tons or 7.4%

Source: Thai Fishmeal Producers Association, 2013; Fishery Statistics Analysis and Research Group (DoF), 2013

Keterangan: Tabel daftar lima provinsi penghasil ikan olahan terbesar di Thailand pada tahun 2011 menurut dua sumber yaitu DoF (Fishery Statistic Analysis and Research Group) dan TFPA (Thai Fishmeal Producers Association). Sumber: *Thai Fishmeal Producers Association 2013*

Data tahun 2011 diatas menunjukkan bahwa provinsi Songkhla menduduki peringkat ketiga setelah provinsi Samutsakorn dan Nakorn Sithammarat dalam produksi *fishmeal* di Thailand. Dimana produksi *fishmeal* provinsi Songkhla mencapai 56.960 ton atau senilai 11.32% berdasarkan catatan TFPA (*Thai Fishmeal Producers Association*) dan mencapai 39.402 ton atau senilai dengan 12.03% menurut catatan DoF (*Fishery Statistic Analysis and Research Group*) pada tahun 2011.

1.3 Kerjasama Ekonomi Amerika–Thailand

1.3.1 Kemitraan Ekspor-Import

Amerika Serikat merupakan pasar ekspor terbesar kedua dan pemasok kelima atas komoditas impor Thailand. KADIN AS di Thailand memperkirakan bahwa Amerika Serikat adalah salah satu investor asing terbesar kedua di Thailand setelah Jepang dengan investasi kumulatif senilai lebih dari US\$ 21 miliar pada tahun 2004. Perusahaan Amerika Serikat berinvestasi di Negara Thailand dengan mempekerjakan lebih dari 200.000 warga Thailand (*The Economist Intelligence Unit dan Global Insight, 2005*). Hubungan ekonomi Amerika Serikat-Thailand ini pun semakin mendalam, dengan Thailand mereformasi ekonominya dan menurunkan hambatan perdagangan.

Berbeda dengan catatan *Thailand Ministry of Commerce 2016*, menurut Kementerian Perdagangan Thailand tersebut, Amerika merupakan Negara teratas dalam tujuan ekspor Thailand. Dimana nilai ekspor Thailand mencapai US\$ 24.498 juta. Hal ini didukung oleh data berikut ini:

Gambar 1.3: Tujuan Ekspor Negara Thailand Tahun 2016



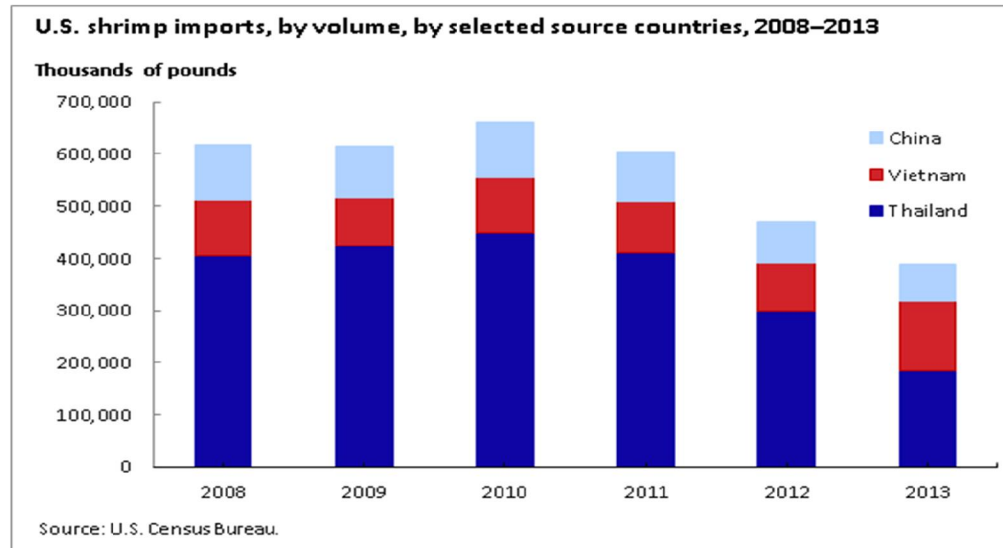
Keterangan: Data diatas menunjukkan Amerika merupakan Negara teratas dalam tujuan ekspor Thailand pada tahun 2016. Diikuti Negara China sebesar US\$ 23.610 juta. Sumber: *Thailand Ministry of Commerce*

Selain dari kebijakan mereformasi ekonomi dan menurunkan hambatan perdagangan antara Thailand dan Amerika tersebut, kabinet Thailand pada tanggal 12 November 2015 mengesahkan keputusan yang mengizinkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra menandatangani empat naskah permufakatan, pernyataan bersama dan naskah MoU antara Thailand dan Amerika. Diantara naskah-naskah tersebut ada permufakatan yang antara lain menyatakan bahwa Thailand setuju melakukan perundingan dengan Amerika Serikat tentang Perjanjian kemitraan ekonomi strategis di kawasan Pasifik atau *Trans Pasific Partnership* (TPP) mengenai perjanjian liberalisasi ekonomi setinggi-tingginya, dengan taraf yang bahkan lebih tinggi dari Perjanjian Perdagangan Bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA).

Mengingat Amerika merupakan negara maju yang memiliki penduduk dan turis mancanegara dari seluruh penjuru negara di dunia, tingkat permintaan terhadap pasokan *seafood* khususnya udang untuk dikonsumsi meningkat dari tahun ke tahunnya. Dikarenakan sumber daya alamnya yang terbatas, Amerika memilih 'impor' menjadi jalan keluar untuk memenuhi permintaan dari para konsumen tersebut. *Seafood* (khususnya udang) yang telah diimpor dari berbagai negara termasuk Thailand, kemudian didistribusikan ke supermarket terkemuka di Amerika, yaitu empat retail global teratas seperti Walmart, Carrefour, Costco dan Tesco (*The Guardian*, 2014).

Data dibawah ini menunjukkan beberapa Negara yang menjadi mitra dagang Amerika, termasuk Thailand. Data dari tahun 2008 hingga 2013 berikut ini menunjukkan besarnya volume impor udang Amerika dari Thailand, China, dan Vietnam. Pasokan udang dari Thailand terhitung mencapai lebih dari 400.000 ton di tahun 2010 dan berkurang menjadi 300.000 hingga 200.000 ton pada tahun berikutnya (2012 dan 2013).

Grafik 1.2
Data Impor Udang Amerika dari Thailand 2008-2013



Keterangan: Data impor udang Amerika Serikat berdasarkan jumlah dan Negara terpilih tahun 2008-2013 berdasarkan Biro Sensus Amerika. Sumber: *U.S Census Bureau* 2008-2013.

Berkurangnya jumlah pasokan udang tersebut dikarenakan berbagai faktor meliputi terjadinya penyakit udang dan isu buruh paksa dan perdagangan manusia yang bertugas menangkap jenis *seafood* tersebut. Selain itu, berbagai tuntutan juga datang dari berbagai NGO (*National Governmental Organization*) untuk Thailand segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun salah satu NGO tersebut adalah EJF (*Environmental Justice Foundation*, 2013).

1.4 Environmental Justice Foundation

EJF adalah sebuah organisasi non-pemerintah (LSM) yang didirikan pada tahun 2001, bertujuan untuk mempromosikan resolusi pelanggaran hak asasi manusia tanpa kekerasan. EJF bekerja secara internasional untuk melindungi lingkungan dan hak asasi manusia. Salah satu tugas utama dari EJF adalah menyelidiki, merekam dan mengekspos pelanggaran dan kemudian berkampanye secara efektif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penekanan ditempatkan pada kekuatan film

dokumenter sebagai bukti ketidakadilan yang tak terbantahkan dan untuk menciptakan pesan kampanye yang kuat.

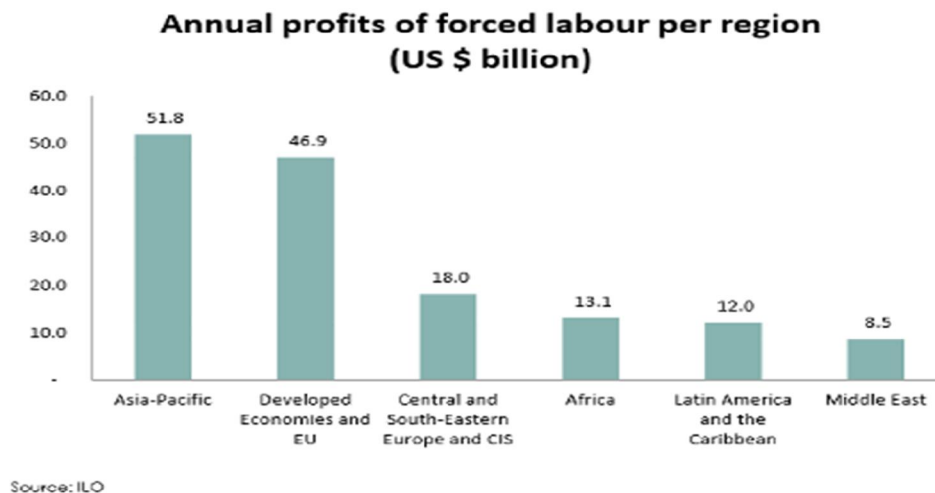
EJF juga bekerja dengan memperingatkan pemerintah, pembuat kebijakan internasional, konsumen dan bisnis serta mendorong tindakan dari pengambil keputusan. Adapun dalam kasus perbudakan dan perdagangan manusia yang terjadi, khususnya di Industri perikanan provinsi Thailand, EJF berupaya penuh untuk melakukan kampanye internasional untuk memberikan perlindungan terhadap para buruh yang dipekerjakan dan dijual diatas kapal dengan mengeluarkan report dan video dokumenter hasil investigasinya yang berjudul 'Sold to the Sea'.

1. 4 Korban Perdagangan manusia di Industri Perikanan Thailand

Sebagai negara transit, Thailand dijadikan sebagai sumber dan tujuan migran tenaga kerja dari berbagai negara yang kemudian menjadikannya sebagai tujuan utama migrasi tenaga kerja paling signifikan khususnya di kawasan GMS (Larsen, 2010: 2). Berdasarkan data dibawah ini, estimasi jumlah orang asing khususnya dari negara tetangga (Kamboja, Laos, Myanmar) yang bekerja di Thailand pada tahun 2013 mencapai 2.766.968 orang. Sebagai negara tujuan utama imigrasi tenaga kerja tersebut, Thailand dimanfaatkan sebagai pusat migrasi illegal (Hugo, 2005:24). Hal ini menciptakan peluang baru bagi pelaku untuk merekrut korban perdagangan manusia dikarenakan semakin meningkatnya tingkat permintaan terhadap tenaga kerja dan perekonomian yang semakin berkembang (World Vision:2).

Proses investigasi *Environmental Justice Foundation* (EJF) menyangkut masalah praktek perbudakan dan perdagangan manusia di Thailand disebabkan karena kasus ini masih menjadi masalah akut dalam industri perikanan Thailand, khususnya industri perikanan Songkhla. Pada tahun 2014, Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengemukakan dalam ILO *report, Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour_2014* bahwa keuntungan yang dapat diraup dari bisnis perdagangan manusia atau *human trafficking* global dapat mencapai US\$ 150 milyar. Dimana US\$ 51 milyar berasal dari eksploitasi tenaga kerja. Hal ini didukung oleh data berikut ini:

Gambar 1.4: Keuntungan Tahunan dari Perdagangan Buruh Paksa 2014

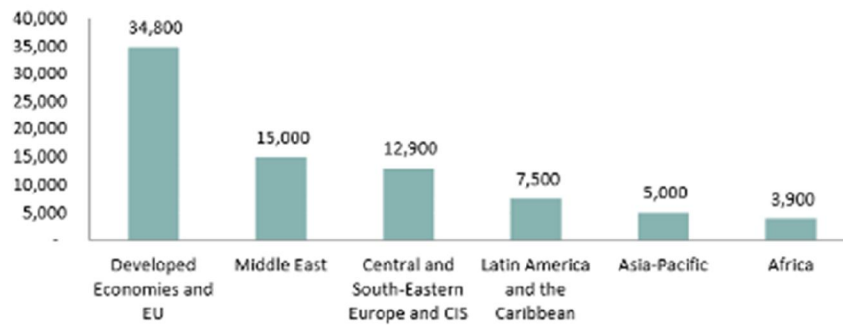


Keterangan: keuntungan tahunan tertinggi dari tenaga kerja paksa di Negara Asia-Pasifik (US\$ 51.8 Milyar), diikuti Negara-negara ekonomi berkembang dan Uni Eropa (US\$ 46.9 Milyar), dan terendah di kawasan Timur Tengah (US\$ 8.5 Milyar).



Keterangan: keuntungan tahunan tertinggi dari jenis eksploitasinya adalah eksploitasi seksual sebesar (US\$ 21.800), diikuti dengan eksploitasi tenaga kerja (US\$ 4.800).

Annual profit per victim of forced labour per region (US \$)



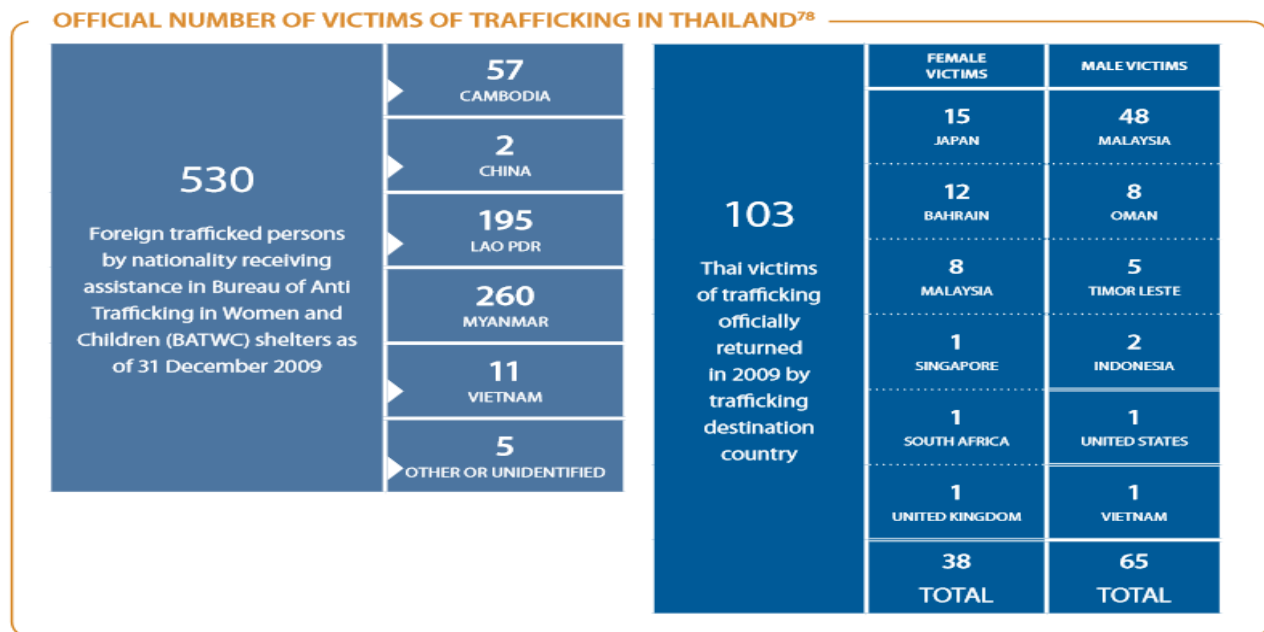
Source: ILO

Keterangan: keuntungan tahunan per korban tertinggi di negara Maju (US \$ 34.800 per korban), diikuti oleh negara-negara di Timur Tengah (US \$ 15.000 per korban), dan terendah di kawasan Asia-Pasifik (US \$ 5.000 per korban) dan di Afrika (US \$ 3.900 per korban)
 Sumber: ILO, 20 Mei 2014/ www.ilo.org.

Data diatas merupakan laporan ILO (*International Labor Organization*) dalam ILO report, *Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour* mengenai Keuntungan Tahunan yang dihasilkan dari Perdagangan Buruh Paksa pada tahun 2014. Menanggapi jumlah keuntungan berdasarkan ketiga data diatas, Direktur General ILO Guy Ryder (20 Mei 2014) dalam pernyataannya mengatakan: *“If we want to make a significant change in the lives of the 21 million men, women and children in forced labour, we need to take concrete and immediate action, That means working with governments to strengthen law, policy and enforcement, with employers to strengthen their due diligence against forced labour, including in their supply chains, and with trade unions to represent and empower those at risk.”*

1.4.1 Korban Perdagangan Manusia di Thailand

Gambar 1.3 Jumlah Korban Perdagangan Manusia di Thailand



Keterangan: Jumlah korban perdagangan manusia di Thailand berdasarkan asal Negara pada tahun 2009. Berikut data korban yang dipulangkan ke negara asalnya. Sumber: *Thailand Human Trafficking Datasheet, 2009*

Data diatas menunjukkan, Myanmar merupakan negara urutan pertama dalam jumlah korban perdagangan manusia di Thailand dari daftar berbagai Negara. Sebanyak 260 warga negaranya menjadi korban perdagangan manusia di Thailand. Kemudian disusul oleh Laos sebanyak 195 orang, dan Kamboja berada di urutan ketiga sebanyak 57 korban. Selain ketiga Negara tersebut, korban perdagangan manusia di Thailand juga berasal dari berbagai Negara seperti Vietnam, China, Malaysia, Jepang dan Negara lainnya.

Data IOM dibawah ini menunjukkan bahwa tahun 2013-2015 terdapat sebanyak 2.367 orang korban perdagangan manusia di Thailand dengan jenis eksploitasi berbeda, seperti berikut ini:

Table 1.2 Statistik MSDHS (*Ministry of Social Development and Human Security*) tentang korban perdagangan manusia berdasarkan tahun dan jenis eksploitasi

2013

Country	Forced prostitution	Forced pornography	Other sexual exploitation	Slavery	Forced begging	Forced labour (excluding fisheries)	Forced labour fisheries sector	Organ trafficking	Other practices resulting in forced extortion	TOTAL
Cambodia	4	-	1	-	68	38	-	-	-	121
China	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3
Laos	86	-	-	-	-	35	-	-	2	123
Uzbekistan	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Myanmar	55	-	-	5	3	49	65	-	1	178
Thailand	493	-	2	-	16	29	9	-	-	549*
Stateless	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL	654	-	3	5	88	151	74	-	5	980

Berdasarkan data tahun 2013 diatas, negara Thailand menduduki peringkat pertama dalam jumlah perdagangan manusia dibandingkan dengan negara Kamboja, China, Laos, Uzbekistan, dan Myanmar. Dari semua jenis eksploitasinya, korban prostitusi paksa berjumlah 493 korban, disusul dengan pekerja paksa mencapai 29 orang; dan korban kerja paksa di industri perikanan berjumlah sembilan orang.

2014

Country	Forced prostitution	Forced pornography	Other sexual exploitation	Slavery	Forced begging	Forced labour (excluding fisheries)	Forced labour fisheries sector	Organ trafficking	Other practices resulting in forced extortion	TOTAL
Cambodia	5	-	-	1	11	1	-	-	3	21
Bangladesh	-	-	-	1	-	47	-	-	-	48
Laos	79	-	-	-	-	9	-	-	-	88
Myanmar	4	-	-	14	2	49	23	-	12	104
Vietnam	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Thailand	248	-	3	1	6	18	18	-	-	294*
Stateless	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Rohingya	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8
TOTAL	338	-	4	17	19	132	41	-	15	566

Berdasarkan data 2014 diatas, Thailand masih menduduki peringkat pertama dalam jumlah korban perdagangan manusia. Korban prostitusi paksa berjumlah 248 orang, kasus perbudakan satu orang, korban kerja paksa dalam industri perikanan Thailand sebanyak 18 orang.

2015

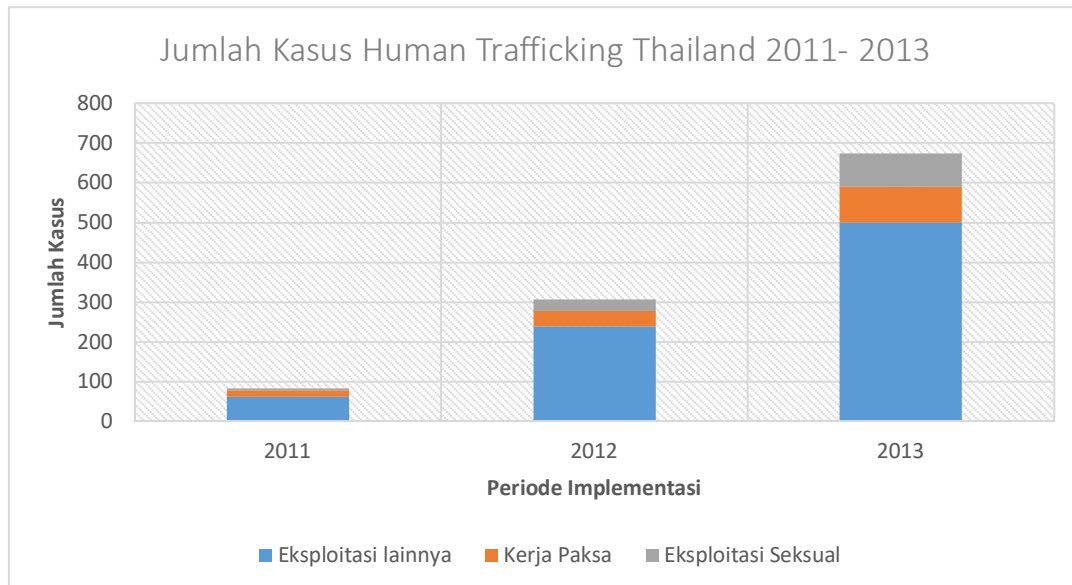
Country	Forced prostitution	Forced pornography	Other sexual exploitation	Slavery	Forced begging	Forced labour (excluding fisheries)	Forced labour fisheries sector	Organ trafficking	Other practices resulting in forced extortion	TOTAL
Cambodia	4	-	-	-	-	5	1	-	-	10
Laos	61	-	-	1	-	26	3	-	-	91
Myanmar	16	-	-	-	1	257	36	-	-	310
Vietnam	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Thailand	270	-	6	-	4	18	35	-	-	333*
Stateless	1	-	-	-	-	1	-	-	27	29
Rohingya	-	-	-	-	-	2	-	-	45	47
TOTAL	353	-	6	1	5	309	75	-	72	821

Berdasarkan data 2014 diatas, Thailand tetap menduduki peringkat pertama dalam jumlah korban perdagangan manusia. Korban prostitusi paksa berjumlah 270 orang, korban kerja paksa dalam industri perikanan Thailand sebanyak 35 orang.

Keterangan: Data diatas diperoleh dari IOM di Bangkok berisi jumlah korban perdagangan manusia di Thailand tahun 2013-2015 berdasarkan jenis eksploitasinya. Sumber: *IOM Country Office Bangkok*, 12 Februari 2018.

Pada tahun 2010, 23% penduduk Kamboja yang tinggal di Thailand dan merupakan korban perdagangan manusia dideportasi oleh Pemerintah Thailand di perbatasan Poipet. Berdasarkan salah satu studi dari *UNIAP (United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking)* dikatakan bahwa setiap tahunnya Pemerintah Thailand melakukan deportasi terhadap lebih dari 23.000 penduduk Kamboja yang menjadi korban perdagangan manusia (Departemen Kesejahteraan Sosial 2006-2007).

Grafik 1.3
Jumlah Kasus Perdagangan manusia di Thailand Periode 2011-2013



Sumber: Royal Thai Police melalui Ministry of Social Development and Human Security

Selain itu, berdasarkan laporan Royal Thai Police melalui Ministry of Social Development and Human Security, kasus perdagangan manusia di Thailand pada tahun 2011 mencapai 83 kasus. Kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 307 kasus, dan mengalami peningkatan dari 307 kasus perdagangan manusia menjadi 674 kasus pada tahun 2013. Dari jenis eksploitasi korban perdagangan manusia berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kerja paksa merupakan salah satu bentuk eksploitasi tertinggi dari kasus *human trafficking* di Thailand.

Tabel 1.3
Jumlah Korban *Human Trafficking* Berdasarkan Asal Negara Tahun 2011-2012

Tahun	Negara					Jumlah
	Thailand	Kamboja	Myanmar	Laos	Negara Lain	
2011	66	15	57	125	16	279
2012	323	153	65	62	20	623

Sumber: Royal Thai Police dan Department of Special Investigation melalui Ministry of Social Development and Human Security.

Adapun korban perdagangan manusia tersebut berasal dari Negara yang berbeda. Menurut laporan Royal Thai Police diatas, korban pada umumnya berasal dari Kamboja, Myanmar dan Laos. Data pada tahun 2011 menunjukkan jumlah perdagangan manusia dari 279 orang meningkat menjadi orang 623 orang pada tahun 2012.

1.4.2 Korban Perdagangan Manusia di Industri Perikanan Provinsi Songkhla

Industri penangkapan ikan berdasarkan laporan IOM 2015 merupakan lingkungan kerja yang keras yang menuntut ketahanan fisik dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah-wilayah yang jauh secara geografis. Untuk memaksimalkan hasil tangkapan ikan, para pekerja diperdagangkan untuk dieksploitasi tenaganya di kapal-kapal penangkap ikan di Thailand khususnya di provinsi-provinsi negara Thailand, termasuk Songkhla. Songkhla merupakan salah satu provinsi di Thailand yang menjadi tempat perdagangan manusia setelah provinsi Kantang.

Kedua provinsi tersebut sama halnya dengan provinsi lain yang memiliki pelabuhan untuk transit dan industri perikananannya memiliki andil yang besar untuk perekonomian di provinsi tersebut. Korban perdagangan manusia dari Myanmar maupun Kamboja berdasarkan hasil investigasi EJF dikirim dan dipekerjakan di perairan Songkhla. Para korban asal Myanmar diperdagangkan dari Kawthaung / daerah Tanintharyi di Myanmar ke Ranong di Thailand. Dari Ranong, orang-orang yang diperdagangkan dipindahkan ke kapal-kapal yang beroperasi di provinsi Pattani, Trang dan Songkhla,

Selain korban yang diperjual-belikan untuk bekerja diatas kapal; di provinsi Songhla, tepatnya di distrik Sadao terdapat juga sebuah kamp kuburan massal perdagangan manusia yang berisi penemuan 26 mayat orang-orang Rohingya yang melarikan diri dengan menggunakan rute jalan darat melalui perbatasan Thailand Selatan pada tahun 2015 dilansir dari laporan BBC Indonesia 2015. Hal ini membuktikan bahwa Songkhla merupakan salah satu provinsi rawan praktek perbudakan dan perdagangan manusia.

1.5 Kronologi Investigasi *Environmental Justice Foundation*

Pada tahun 2009, Kementerian Tenaga Kerja Thailand memperkirakan bahwa sebanyak 116.000 pekerja tambahan akan dibutuhkan untuk mengatasi ketidakseimbangan pasar tenaga kerja. Kekurangan tenaga kerja ini kemudian mendorong oknum-oknum tertentu untuk memasok tenaga kerja murah untuk pekerjaan di kapal nelayan Thailand, termasuk di provinsi Songkhla. Disamping itu, hukum ketenagakerjaan yang bersifat membatasi dan proses imigrasi yang rumit, membingungkan dan mahal - terutama berkenaan dengan pekerja terampil rendah, hingga menyebabkan jaringan penyelundupan berkembang. (EJF, 2012:11)

Sebuah survei 2009 oleh *United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking (UNIAP)* menemukan bahwa 59 persen migran yang diwawancarai yang diperdagangkan di kapal nelayan Thailand melaporkan bahwa mereka menyaksikan pembunuhan rekan kerja mereka. Kapal penangkap ikan Thailand yang berada di perairan-perairan Asia Pasifik hampir secara eksklusif diawaki oleh migran-diperkirakan 200.000 dari negara tetangga Thailand, banyak diantaranya telah diperdagangkan dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang mengerikan, tanpa bayaran dan mengalami penindasan brutal. Kekerasan, penahanan paksa dan bahkan pembunuhan biasa dilakukan, sementara mereka yang melakukan kejahatan tersebut sering kali tidak dihukum (UNIAP, 2012).

Dalam upaya menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia, EJF bekerja memberikan suara kepada masyarakat internasional. Pada tahun 2011, EJF (*Environmental Justice Foundation*) melakukan sebuah investigasi di semua industri perikanan Thailand, termasuk Songkhla. Proses investigasi ini melalui hasil wawancara dengan para korban perbudakan dan perdagangan manusia yang didokumentasikan kedalam sebuah laporan EJF yang berjudul '*SOLD TO THE SEA EJF 2013: Human Trafficking in Thailand's Fishing Industry*'.

1.5.1 Bentuk Perbudakan dan Penyiksaan di Industri Perikanan Songkhla Thailand

Berdasarkan laporan *The Guardian* 2014, semakin pesatnya industri perikanan Thailand semakin mendorong munculnya aksi yang mengarah pada praktek eksploitasi dan perbudakan. Para korban perdagangan manusia di kapal-kapal penangkap ikan Thailand pun dipaksa untuk bekerja selama 20 jam perharinya. Korban perdagangan manusia bernama Sombatt (21 tahun) yang berhasil kabur dari kapal tempat ia diperkerjakan menyebutkan upah yang ia peroleh hanya sebesar 5.000 baht (dua juta rupiah) tiap bulannya, tidak sebanding dengan tuntutan dan jumlah jam kerja yang harus dipenuhi setiap harinya. Disamping Sombatt dipaksa untuk memperbaiki jala penangkap ikan selama tiga hari berturut-turut.

Selain itu, menurut laporan ILO atau Organisasi Buruh Internasional, para pekerja tersebut juga seringkali diperlakukan secara tidak manusiawi. Tindak kekerasan, penganiyaan bahkan pembunuhan merupakan hal yang lumrah di lingkungan kerja mereka. UNIAP melaporkan bahwa lebih dari 59% anak buah kapal perusahaan perikanan Thailand pernah menyaksikan tindak pembunuhan atas rekan kerja mereka selama bekerja di atas kapal. Fakta tersebut tentu menjadi bukti bahwa praktik perdagangan manusia yang berujung pada tindak perbudakan di kapal-kapal penangkap ikan Thailand tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Irwandi, 2016)

Berdasarkan laporan EJF 'Pirates and Slaves 2015' dalam *Slavery in Thailand's Fishing Industry*, perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh para korban perbudakan dan perdagangan manusia di industri perikanan Thailand beragam, dari UNIAP, ILO dan Zimmerman *et al* melaporkan sebagai berikut:

Tabel 1.4

Laporan Perbudakan di industri perikanan Songkhla Thailand (UNIAP, ILO, Zimmerman et al)

UNIAP (2009)	ILO (2013)	Zimmerman et al (2014)
59% witnessed executions at sea	42% experienced wage reductions	80% reported never feeling free
	17% worked against their will	68% reported sexual/physical violence
	17% were threatened with violence	52% witnessed their boss/ trafficker harming someone
	11% attempted escape	47% reported at least one injury
	10% were severely beaten	44% reported lack of food
	94% had no contract	23% were locked in a room during trafficking situation
(n=49)	(n=596)	(n=275)

Sumber: *Environmental Justice Foundation*, 2015

Menurut data dari tiga sumber berbeda diatas, korban Perbudakan dan Perdagangan manusia di Industri Perikanan Songkhla Thailand, 68% dari 275 orang; melaporkan mendapat kekerasan fisik, 42% dari 596 orang; mengalami penurunan upah, 52% dari 275 orang; pernah menyaksikan bos atau *trafficker* melukai seseorang. dan 47% dari 275 orang; melaporkan paling tidak memiliki satu luka, dan 59% dari 49 orang pernah melihat rekannya dieksekusi dilaut.

Environmental Justice Foundation mewawancarai enam kelompok termasuk 14 pekerja kapal berkewarganegaraan Myanmar yang menjadi korban perdagangan manusia yang berhasil lolos dari pelabuhan kota Kantang Saat melakukan proses investigasi selama enam bulan, pekerja kapal yang diwawancarai oleh EJF menuturkan bahwa mereka dipaksa bekerja selama 20 jam per hari, tidak mendapatkan upah,

menjadi saksi melihat tubuh salah satu rekannya dibuang ke laut dan mendapatkan kekerasan fisik seperti mendapatkan pukulan dari crew seniornya.

Dari hasil wawancara EJF didukung laporan *U.S Department of State* 2013 berikut beberapa korban perdagangan manusia di industri perikanan Thailand termasuk Songkhla - yang menuturkan pengalamannya:

“They would torture and murder the fishers then throw them into the sea. They abused the crew in many ways – beating, hitting and killing out on the ocean. I witnessed murder with my own eyes.”

(Tun Thet Soe, escaped victim of trafficking)

“If we hadn’t caught any fish when the nets were full up, we were not given any food. If there was a chance before pulling the nets, we might get 15 or 30 minutes rest.”

(Aung Kyi, escaped victim of trafficking)

“I’d been working for many years, I didn’t get any money. Luckily I didn’t die. Here are the wounds that I got, where they stabbed me with their knives. I’d tried to escape from them ever since I was sent to the sea. But I was captured again, I was beaten. Since then, I decided that, whatever happens, I would run away when I went back to port.”

(Thein Myat, escaped victim of trafficking)

“I want to tell (customers) about our troubles. We sacrificed our blood, sweat and energy. I really would like to let them know about our nightmares.”

(Yu Win, escaped victim of trafficking)

“Our money is with the owner, so he can decide to give us permission to change jobs or not. They hold all the power and we can’t do anything.”

(Sinuon Sao, Cambodian migrant on a fishing vessel, November 2016)

“I didn’t know what was going on when I arrived. They just put me in a lockup, and it was only when the boat came in that I realized that was where I’d have to work. I went to do my pink card application on the 4th, and on the 5th I was out on the boat.”

(Burmese trafficking survivor, Bang Rin, March 2016)

“If I want to quit working here I need to request permission from the employer. Some employers allow us to leave, but some will claim we must pay off debts first. For example, if I can pay 25,000 baht/ US\$762 to an employer, he may allow me to leave, but if he isn’t satisfied. I would have to pay whatever he demanded.”

(Thet Phyo Lin, Burmese fisher, August 2016)

“You can’t leave because if you leave you won’t get paid, and if you want to leave at the end it’s only if they let you. Unless you leave without your money and your pink card, you have to obtain their permission.”

(Bien Vorn, Cambodian fisher, November 2016)

“It was torture. One time I was so tired I fell off the boat, but they pulled me back on board.”

(Zin Min Thet, Burmese trafficking survivor, March 2016)

“We don’t have time for actual rest. For example, we’ll depart at 6 a.m. from the port and then deploy the nets to catch the fish, and after awhile we haul up the load. We’ll do that routinely until late at night, depending on the amount of fish we catch. So it’s already the morning of the next day by the time we get back to port. However, we don’t have a chance to rest because then we have to start unloading all the fish.”

(Sai Tun Aung Lwin, Burmese fisher, March 2016)

1.5.2 Broker

Dalam laporan investigasi SOLD TO THE SEA EJF 2013, kasus perdagangan manusia di Thailand, khususnya di industri perikanan, pada umumnya dilancarkan oleh oknum dengan sebutan *broker*. Broker adalah pedagang perantara yang bertugas merekrut calon *low-skilled migrant* untuk bekerja di Thailand. Jaringan kelompok broker mengirim pekerja migran dari satu broker ke broker lain hingga kepada pemilik kapal.

Berdasarkan laporan IOM 2011, rute perjalanan korban perdagangan manusia yang akan dipekerjakan paksa di Industri Perikanan Thailand sebagai berikut:

1. Korban perdagangan manusia asal Kamboja menempuh rute perjalanan dari Poi Pet, Battambang, Ban Laem-Chantaburi, atau Koh Kong-Trad menuju Samut Prakan, Rayong, atau Chonburi Thailand sesuai laporan IOM 14 January 2011:

“For Cambodian nationals, the major trafficking route is from Poi Pet across to Aranyaprathet, and then on to either Pak Nam district in Samut Prakan, or Rayong or Chonburi provinces. Other crossing points for Cambodians are Battambang/Ban Laem-Chantaburi and Koh Kong-Trad - again with the unwary being trafficked to Samut Prakan or Rayong/Chonburi. Because of weather patterns, fishing boats cannot operate out of Pattani all year, and many shift to eastern seaboard ports like Klong Son (Trad province) and Rayong - creating networks and connections that result in transfer of Cambodian trafficking victims from those ports to boats in Pattani heading into international waters off of Malaysia and Indonesia.”

2. Korban asal Myanmar dikirim ke pelabuhan Mahachai dan Kantang. Perjalanan ditempuh menggunakan kapal melalui distrik Ra-mard, provinsi Tak dan distrik Kapur provinsi Ranong. Menggunakan mobil melalui Mae Sot provinsi Tak dan Mae Sai provinsi Chiang Rai. Hingga perjalanan dapat ditempuh dengan berjalan kaki melalui rute perbatasan Myanmar–Thailand, provinsi Kanchanaburi, provinsi Tak dan Chiang Rai.

Korban asal Myanmar yang akan dipekerjakan di industri perikanan Thailand melalui rute penyebrangan Kawthaung ke Ranong kemudian menuju provinsi Mahachai, Pattani, Tang, Surat Thani dan provinsi Songkhla.

“For Myanmar nationals, the primary route is from Kawthaung to Ranong, and then onto fishing boats in Mahachai, Songkhla, Pattani, Surat Thani, or Trang. A secondary route is from Myawaddy to Mae Sot, and then down to Samut Sakhon, Samut Prakan or Chonburi - with some transfers of trafficked fishermen going on to Songkhla.” (IOM, 2011: 25)

Environmental Justice Foundation menyebutkan bahwa minimnya pengawasan polisi di perbatasan Myawaddy-Thailand, membuat *broker* tidak mengalami kesulitan untuk mengirim korban (EJF, 2013). Laporan IOM yang berjudul *“Trafficking of Fisherman in Thailand”* menyebutkan bahwa *“most of the migrants do not know they are or what is happening to them until they arrive”* (IOM, 2011). Hal ini didukung oleh berbagai pernyataan korban yang berhasil diwawancarai:

1. Ma Than dan Cho Myint, Myanmar

“When I came here, I came with a broker. The employer bought each worker for 5.000 bath. The employer keeps our passports. We never get to hold any documents. They don’t allow us to hold it but a copy is given, They deduct the ID work permit card fee first. The original is not given because they are afraid of our escape. We have lived here for 2 years and my debt is 12.000 bath. There are some workers who ran away. There are some who are caught and they are not brought back to the factory. Some brokers do bring workers back into the factory, but the others are being sold.” (EJF, 2013)

2. Aung Myo, Myanmar

“I was looking for ways to help my family. This broker knew I was looking for work. He said he could find me a job in Thailand. All I had to do was pay a 12.000 bath fee. There was probably around 700 of us. Old men, teenage girls, everyone. We travelled in a convoy in pick-up trucks. Then we trekked for days through the jungle. There was no food. Some died on the way, others got left behind. When I saw the fishing boats, I realized I’d been sold. My first day I got sick so I couldn’t work. They hit me and kicked me and tortured me and they beat me nearly every day after that. Sometimes the captain would scream at me and point his gun in my face. There were 12 of us on the boat and almost all of us had been trafficked. One night, two guys tried to escape. The skipper caught one, beat him, tortured him and gave him electric shocks. Then he shot him and kicked him into the sea. Six months passed and I still hadn’t been paid. The captain said my broker’s fee had doubled, so I decided to escape. There was no difference for me anymore between life and death. I tied a buoy around my waist and swam towards the lights.” (The Guardian, 2014)

3. Myo Thant Kyaw, Myanmar

“Whenever I came back to port they told me I owed them 20,000 or 30,000 baht [\$558 or \$837]. I couldn’t ask why I owed this amount. If I asked why, they would beat me – any one of them would’ve killed me, so I didn’t ask. I’ve seen beatings and killings before so I didn’t dare ask.” (EJF, 2015: 18)

Berdasarkan hasil investigasi tersebut, negara Thailand dinilai gagal dalam memerangi praktek perbudakan dan perdagangan manusia. Departemen Luar Negeri AS mengungkapkan bahwa pelanggaran tenaga kerja di sektor makanan laut sebagian besar diabaikan oleh pemerintah. Thailand bersama dengan negara seperti Iran, Suriah dan Zimbabwe termasuk kedalam 23 negara yang menerima peringkat terendah dalam laporan penilaian tahunan AS. Laporan tersebut berbentuk peringkat tahunan dalam

tingkatan yang dikenal dengan TIP atau *The US State Department Trafficking in Persons*.

Dalam menanggulangi masalah Perdagangan Manusia, Pemerintah Amerika mengembangkan Prinsip 3P yaitu:

1. *Prosecution* (penuntutan hukuman bagi pelaku perdagangan manusia)
2. *Protection* (perlindungan untuk korban perdagangan manusia)
3. *Prevention* (pencegahan agar kejahatan perdagangan manusia dapat terus ditekan)

Dalam laporan TIP, Departemen Luar Negeri Amerika bertanggung jawab mendata peringkat di 200 negara dunia berdasarkan upaya mereka memerangi tindak pidana perdagangan manusia serta menempatkan masing-masing Negara setiap tahunnya ke salah satu dari empat tingkatan berdasarkan sejauh mana upaya pemerintah mematuhi standar minimum dalam penghapusan perdagangan manusia yang ditemukan di *Trafficking Victims Protection Act (TVPA)*.

1.6 Trafficking Victims Protection Act (TVPA)

TVPA (*Trafficking Victims Protection Act*) merupakan ketentuan atau undang-undang yang mengatur mengenai standar minimal untuk mengurangi dan menangkal praktik perdagangan manusia yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. TVPA merupakan landasan kebijakan Amerika Serikat untuk melakukan pencegahan dan memberikan bantuan dana kepada negara lain untuk dapat bersama-sama memerangi kejahatan perdagangan manusia. Tujuan dari TVPA adalah untuk mencegah eksploitasi, menghukum para perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang (Karen Moser, 2012:1).

Terdapat tiga poin utama dalam TPVA atau yang dikenal dengan 3 P's (*Protection, Prosecution and Prevention*) berisi tiga langkah utama dalam memerangi kasus perdagangan manusia melalui tindakan perlindungan, prosekusi dan pencegahan. TVPA (*Trafficking Victims Protection Act*) dirumuskan pada tahun 2000 dimasa pemerintahan presiden Bill Clinton (Walker, 2008: 1). Kebijakan TVPA sudah

melewati tiga kali amandemen yaitu pada tahun 2003, 2005, dan 2008. Adapun alasan amandemen adalah pemerintah Amerika Serikat mengambil tambahan langkah untuk meningkatkan tuntutan dan hukuman bagi para pelaku perdagangan manusia, mempertegas status korban perdagangan manusia bukan sebagai imigran ilegal / *illegal aliens*, menyediakan lebih banyak pelayanan berupa pelayanan konseling, bantuan kesehatan untuk para korban termasuk pengurusan Transit Visa dan pendataan dari *U.S Department Health and Human Services*. Dengan kata lain, perubahan-perubahan atau amandemen dalam peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan regulasi dalam memerangi perdagangan manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Korban Trafficking tahun 2000 diatas, adapun standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia berlaku bagi pemerintah negara asal, transit, dan negara tujuan. Sebagaimana diatur dalam TPVA tersebut, pemerintah harus melarang bentuk-bentuk perdagangan manusia yang berat dan menghukum tindakan perdagangan manusia. Pemerintah negara harus menjatuhkan hukuman yang sepadan dengan kejahatan berat meliputi praktik kekerasan, kecurangan, pemaksaan, atau dimana korban perdagangan seks, pemerkosaan, penculikan atau yang menyebabkan kematian. Serta pemerintah negara harus melakukan upaya serius dan berkelanjutan untuk menghapus bentuk-bentuk perdagangan manusia. Adapun sanksi yang diberlakukan apabila suatu negara tidak serius dalam penanganan kasus perdagangan manusia, pemerintah Amerika Serikat berdasarkan laporan *U.S Department* 2013 menyatakan akan memutus kerjasama ekonomi maupun kerjasama lainnya jika terbukti dalam negara tersebut ditemui banyak praktek perdagangan manusia.

1.7 TVPRA (*Trafficking Victims Protection Reauthorization Act*)

Kebijakan TVPA mengalami perubahan ditahun 2003 pada masa pemerintahan presiden George Bush Jr menjadi TVPRA (Walker, 2008: 1). TVPRA (*Trafficking Victims Protection Reauthorization Act*) 2003 merupakan amandemen dari kebijakan TVPA 2000 yang digagas oleh presiden Bill Clinton. Pada tahun 2003, Kongres Amerika Serikat mengesahkan TVPA berganti nama menjadi TVPRA (*Trafficking*

Victims Protection Reauthorization Act). TVPRA menyediakan dana bagi Amerika Serikat untuk membantu negara lain dalam melawan praktik perdagangan manusia di negaranya. Kebijakan TVPRA di era George Bush menyediakan kurang lebih \$200 juta untuk melawan praktik perdagangan manusia di seluruh dunia. TVPRA memperbaharui komitmen pemerintah Amerika Serikat untuk mengidentifikasi dan membantu korban baik buruh kasar maupun korban perdagangan seksual.

TVPA merupakan landasan kebijakan Amerika Serikat baik di dalam maupun di luar negeri untuk dapat melakukan pencegahan dan bantuan dana kepada negara lain untuk dapat bersama-sama memerangi kejahatan perdagangan manusia. *Trafficking Victims Protection Act* dirumuskan pada tahun 2000 dimasa pemerintahan presiden Bill Clinton (Walker, 2008: 1). Kebijakan ini mengalami perubahan ditahun 2003 pada masa pemerintahan presiden George Bush Jr menjadi TVPRA/ *Trafficking Victims Protection Reauthorization Act* (Walker, 2008: 1). Adapun perubahan-perubahan yang dimaksud adalah:

TVPRA 2003 (P.L 108-193)

Terdapat penambahan regulasi dalam TVPRA 2003 untuk memerangi perdagangan manusia dimana korban diberikan izin untuk menuntut trafficker/ pelaku perdagangan manusia ke pengadilan.

TVPRA 2005 (P.L 108-193)

Adapun penambahan peraturan dalam TVPRA 2005 adalah penyediaan program rehabilitasi untuk korban perdagangan manusia.

TVPRA 2008 (P.L 110-457)

Dalam kebijakan TVPRA 2008 terdapat penambahan regulasi terhadap pekerja paksa/ *forced labour*, dimana 'force' tersebut ditegaskan melanggar hukum yang berlaku. Serta menambah hukuman kepada pelaku perdagangan manusia dan membuat penalty kepada orang yang terlibat mengambil keuntungan dalam sebuah kasus perdagangan manusia dan menambah kebijakan pencegahan dan perlindungan baru.

TVPRA 2013 (P.L 113-4)

Sementara dalam TVPRA 2013 terdapat penambahan kebijakan dalam penegakan hukum untuk menginvestigasi kasus perdagangan manusia, menyediakan pelayanan sumber daya pendukung untuk para *survivor* dan kebijakan dalam pencegahan buruh paksa atau perbudakan modern. Mencegah bantuan Amerika Serikat masuk ke negara-negara yang memiliki *child soldiers* atau tentara anak (Alliance To End Slavery and Trafficking/ ATEST, 2017).

1.8 Tabel Laporan *US Trafficking in Person*

Kondisi perdagangan manusia dalam suatu negara dicerminkan dalam peringkat atau yang disebut dengan istilah *tier* dalam *Trafficking in Person Report*, sehingga *tier* ini dapat digunakan sebagai suatu tolok ukur keberhasilan negara menerapkan kebijakan untuk memberantas *human trafficking*. Laporan peringkat negara-negara didunia setiap tahunnya akan dipublikasi oleh *U.S. Department of State* diwebsite resminya. Dalam laporan tersebut, tier adalah skala bagi status *human trafficking* berbagai negara dan usaha pemerintah untuk memenuhi standar TVPRA. Pada data TIP tahun 2008–2016 ada empat peringkat yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu negara dalam menanggulangi masalah perdagangan manusia `sesuai tabel diatas:

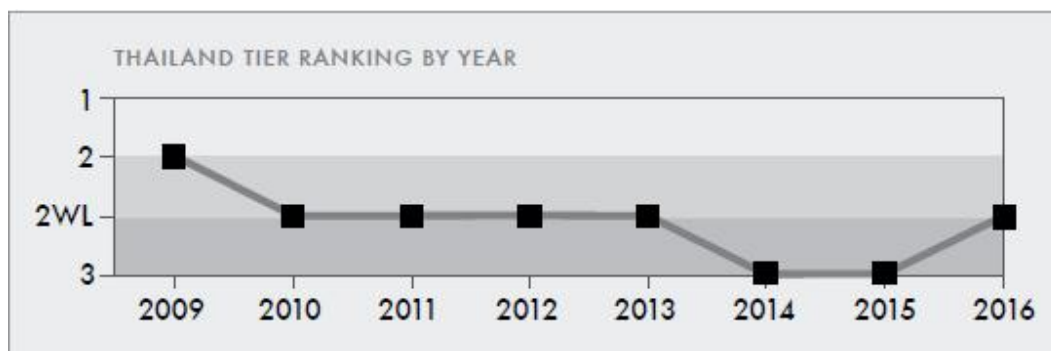
1. **Tier 1** (peringkat 1): negara yang pemerintahannya memenuhi standar minimal kebijakan TVPRA. *Tier 1* adalah peringkat tertinggi, bukan berarti sebuah negara tidak memiliki masalah perdagangan manusia. Sebaliknya, peringkat Tingkat 1 menunjukkan bahwa pemerintah telah mengakui adanya perdagangan manusia, melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut, dan mematuhi standar minimum *Trafficking Victims Protection Act* (TVPA). Setiap tahun, pemerintah perlu menunjukkan kemajuan yang berarti dalam memerangi perdagangan manusia untuk mempertahankan peringkat Tingkat 1.

2. **Tier 2** (peringkat 2): negara yang pemerintahannya tidak memenuhi standar minimal kebijakan TVPRA namun masih berusaha untuk memenuhi standar tersebut.
3. **Tier 2 Watch List** (peringkat 2 dengan pengamatan): negara yang masuk kriteria peringkat kedua dengan pengamatan (Watch List) adalah negara yang pemerintahannya tidak memenuhi standar minimal kebijakan TVPRA namun masih berusaha untuk memenuhi standar tersebut dan jumlah korban perdagangan manusia di negara tersebut tergolong tinggi, adanya kegagalan negara tersebut dalam memberikan bukti dalam meningkatkan usaha untuk melawan praktik perdagangan manusia.
4. **Tier 3** (peringkat 3): negara yang pemerintahannya tidak memenuhi standar minimum kebijakan TVPRA dan tidak melakukan usaha sama sekali untuk memenuhi standar.

1.9 Peringkat/ Tier Thailand

Tabel 1.6

Peringkat Tier Thailand tahun 2009-2016



Sumber: *Trafficking in Persons Report*, 2016

Dari tabel di atas, selama delapan tahun terakhir Thailand tidak pernah mendapatkan posisi tier 1. Thailand pada tahun 2009 berada di Tier 2, dari tahun 2010 hingga 2013 berada di Tier 2 *Watch List*, namun tahun 2014-2015 berada di Tier 3 atau peringkat terburuk pascakudeta yang terjadi di Thailand dan pada tahun 2016 kembali

ke Tier 2 *Watch List*. Ketidakmampuan Thailand dalam memberantas praktek perbudakan dan perdagangan manusia membuat Thailand dimasukkan pada tingkat tiga dalam laporan *Trafficking in Person* pemerintah Amerika Serikat tahun 2014.

Laporan tahunan *Walk Free Foundation* 2014 menyebutkan bahwa Thailand menempati urutan ke 10 dunia disebabkan jumlah korban perbudakan dan perdagangan manusia yang bekerja di sektor perikanan Thailand mencapai 475.300 orang. Bahkan menurut laporan tersebut 16,9% sampel dari 600 buruh di Thailand yang di survei telah menjadi korban perbudakan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi terjadinya perdagangan manusia dalam industri perikanan Thailand sangat tinggi (*Walk Free Foundation*, 2014).

Penempatan Thailand di tier tiga oleh Departemen Amerika Serikat juga disebabkan karena tercatat Thailand menginvestigasi 333 kasus, menuntut 301 orang dan mendakwa 268 tersangka. Jumlah ini meningkat dibandingkan laporan TIP Thailand 2015 sebanyak 317 kasus yang diselidiki, 242 orang dituntut dan 241 orang didakwa.. Departemen Luar Negeri AS menilai pelanggaran tenaga kerja di sektor makanan laut sebagian besar diabaikan pemerintah (*Associated Press*, 2015). Data diatas juga didukung oleh laporan *U.S Department of State* dalam Pemetaan Tier Negara GMS (Great Mekong Sub-River) tahun 2001-2013:

	2001			2002			2003			2004			2005			2006			2007			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Burma			v			v			v			v		v		v					v	Burma
Cina		v			v			v			v		WL		-					WL		Cina
Indonesia			v			v		v			v			v		WL				v		Idn
Kamboja		v				v		v			v				v	WL				WL		Kmbj
Laos		v				v		v			WL			v		v				v		Laos
Thailand		v				v		v			WL			v		v				v		Thai
Vietnam		v				v		v			WL			v		v				v		Vietn
	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			
Burma			v			v				v			WL		WL							Burma
Cina		WL			WL			WL		WL			WL			*						Cina
Indonesia		v			v			v		v			v		v							Idn
Kamboja		v			WL			v		v			v		v		WL					Kmbj
Laos		v			v			WL		v			v		v		v					Laos
Thailand		v			v			WL		WL			WL		WL		WL					Thai
Vietnam		v			v			WL		WL			v		v		v					Vietn

Keterangan: Tabel diatas adalah laporan *Trafficking in Person* Amerika Serikat 2013 yang mencatat daftar peringkat/ posisi tier Negara Myanmar, China, Indonesia, kamboja, Laos, Thailand dan Vietnam dari tahun 2001-2013. Sumber: *U.S Department of State* 2013

Kedua grafik dan tabel diatas menunjukkan data yang sama, dimana pada tahun 2009, Thailand berada di Tier 2 dan tahun 2010-2013 berada di Tier 2 *Watch List*.